

Judul : Pendaftaran Tanah Masyarakat Punya Kepastian Hukum  
Tanggal : Selasa, 04 November 2025  
Surat Kabar : Rakyat Merdeka  
Halaman : 3

## Pendaftaran Tanah Masyarakat Punya Kepastian Hukum



Ujang Bey

ANGGOTA Komisi II DPR Ujang Bey mengingatkan pentingnya pendaftaran tanah masyarakat sebagai upaya kepastian hukum melindungi hak-hak masyarakat atas tanahnya. Kepastian hukum akan memberikan rasa aman dalam pemanfaatan dan pengembangan aset tanah masyarakat.

Pada akhirnya, hal tersebut bisa digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. "Informasi yang disampaikan akan membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam pengelolaan tanah," ucap Bey dalam keterangannya, Minggu (2/11/2025).

Bey lalu memaparkan manfaat program kemitraan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Di antaranya, prosedur pendaftaran lebih sederhana, penerbitan sertifikat lebih cepat, dan data pertanahan makin transparan berkat teknologi digital.

"Kami terus menggandeng berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan

layanan pertanahan yang mudah, cepat, dan terpercaya menyentuh seluruh lapisan masyarakat," jelas legislator Partai NasDem itu.

Bey menegaskan komitmennya memperjuangkan hak-hak masyarakat terkait pertanahan. Program kemudahan layanan pertanahan berjalan transparan dan benar-benar bermanfaat bagi warga. "Saya akan memastikan program ini dijalankan dengan baik, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat seluruh Indonesia," ucapnya.

Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermaawan menjelaskan, Pemerintah mempercepat transformasi digital sebagai strategi utama dalam mengurangi konflik dan sengketa pertanahan yang kerap meresahkan masyarakat. Migrasi dari sistem analog ke digital akan menjadi kunci untuk meminimalkan masalah pertanahan nasional. "Jika digitalisasi ini berhasil, akan dapat meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia," jelasnya.

Inisiatif digitalisasi ini tidak hanya mempercepat proses administrasi pertanahan, tapi juga menutup peluang tumpang tindih sertifikat lahan dan meningkatkan akurasi data kepemilikan.

Menurut Ossy, sebagian besar kasus konflik tanah berakar dari kekacauan administrasi. "Karena itu, modernisasi sistem menjadi solusi efektif untuk menciptakan layanan yang lebih transparan dan efisien," tegasnya. ■ PYB